



► INOVASI LAYANAN PASAR

## Cegah Pungli, Disdag Usung Gerakan Dirantasi

**D**inas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja memastikan seluruh pembayaran retribusi fasilitas di pasar rakyat dilakukan secara digital. Inovasi ini dikemas dalam gerakan Digitalisasi Pembayaran Retribusi Fasilitas melalui QRIS dan Transfèr UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I Disdag Kota Jogja atau Dirantasi.

Kepala Disdag Kota Jogja, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan ada 114 fasilitas yang tersebar di 29 pasar rakyat di Kota Jogja. Beberapa di antaranya fasilitas parkir dan toilet. Ambar mengatakan, pengelola berbagai fasilitas itu menjalin kontrak dengan Disdag Kota Jogja dan membayar retribusi setiap tahun. Total dari pengelolaan 114 fasilitas itu menyumbang retribusi hingga Rp 1,5 miliar. Dia memastikan, proses pembayaran retribusi kini berbasis digital.

"Pembayaran melalui QRIS atau transfer ke rekening yang langsung masuk ke kas daerah yang dikelola oleh BPD DIY," ujar Ambar saat ditemui di Pasar Beringharjo sisi timur, Selasa (22/7).

Ambar menyatakan, gerakan *Dirantasi* merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Disdag Kota Jogja dalam pengelolaan retribusi demi mencegah pungli.

Harian Jogja/ Afri Annissa Karin

**Kepala Disdag** Kota Jogja, Veronica Ambar Ismuwardani (*kanan*), saat meluncurkan gerakan *Dirantasi* dalam upaya digitalisasi pembayaran retribusi fasilitas pasar rakyat di Pasar Beringharjo, Selasa (22/7).

Sebab, transaksi yang dilakukan secara digital menghindari terjadinya transaksi langsung antara pengelola dengan pegawai Disdag Kota Jogja. "Masing-masing sudah punya

QRIS, transfer sudah tahu ke mana tujuannya dalam pembayaran. Kami lebih senang kalau teman-teman pengelola membayar melalui *digital payment*," tuturnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim, menurkan penggunaan QRIS pada proses pembayaran retribusi mendukung program pemerintah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Di sisi lain, metode pembayaran ini akan memudahkan pengelola untuk melakukan pembayaran. Sebab, tak perlu repot lagi untuk menyiapkan uang tunai. Tak hanya pengelola, pemerintah juga diuntungkan dalam hal pengelolaan administrasi retribusi. "Ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam hal administrasi," tuturnya. (Afri Annissa Karin/\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005